

Hj. Hasnah Syam dan Juga Ketua Tim Penggerak PKK Barru Hadir RAKOR Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting

Borahima - BARRU.PUBLIKINDONESIA.COM

Feb 3, 2022 - 01:36



Ketua TP PKK Barru Hj. Hasnah Syam Hadiri Rakor Percepatan Penurunan Stunting

BARRU- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru drg. Hj. Hasnah Syam, MARS menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan dan Penurunan Stunting

Tingkat Kabupaten Barru (Review EPPGBM) Rabu, 2/2/2022 di Aula Bappeda Barru.

Ketua Bappeda Barru Umar. SKM. memaparkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Barru dan fokus utama pembangunan 2023.

Sementara Ketua TP. PKK Kabupaten Barru drg. Hj. Hasnah Syam, MARS mengatakan, persoalan stunting adalah persoalan krusial dan merupakan salah satu isu krusial nasional terutama ditengah Pandemi Covid 19.

Dikatakan, Tahun 2019 - 2021 terdapat penurunan sebesar 3,5 %. Dan kita optimis di 2024 memenuhi target yang telah ditentukan karena menurut data untuk Kab. Barru ada diatas 8,3% Provinsi Sulsel di atas 9,2 % serta nasional 10%.

"Rapat kordinasi ini dilakukan untuk melakukan langkah-langkah yang konkret dan penyamaan persepsi. Selain itu bertujuan agar tercapainya integrasi program pelaksanaan intervensi stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan," terang dia.

Hasnah Syam yang juga adalah Anggota DPR. RI Komisi IX Fraksi Nasdem itu menguraikan, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak cenderung lebih pendek atau kerdil dibanding anak seusianya. Hal ini lanjut dia akibat kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal. Namun demikian Stunting dapat dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan.

Lebih lanjut istri Ir. H. Suardi Saleh Bupati Barru dua periode itu menjelaskan, Stunting disebabkan oleh faktor Multidimensi seperti, Praktek pengasuhan yang kurang baik. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, Ante Natal Care, Post Natal dan pembelajaran diri yang berkualitas.

Kurangnya akses ke makanan bergizi. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Oleh karenanya, penanganannya perlu dilakukan oleh multi sektor.

Hadir dalam Rapat Kordinasi tersebut, Pimpinan OPD terkait, para Camat, Kepala Desa/Kelurahan, dan para kepala Puskesmas.

(Red/syam)